



## **ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN MODEL *FISCAL TREND MONITORING SYSTEM*: STUDI KASUS KABUPATEN BANDUNG**

R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung  
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta  
rouffieputra@gmail.com

Elvira Mulya Nalien\*  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri, Agam  
elviramnalien@ipdn.ac.id

\*Alamat Korespondensi: [elviramnalien@ipdn.ac.id](mailto:elviramnalien@ipdn.ac.id)

### **ABSTRACT**

Any local government in Indonesia has different financial capabilities and conditions according to their respective indicators and factors. These financial conditions also have an impact on how the regional government's ability to deal with obstacles such as the corona virus disease-2019 (COVID-19) pandemic which has a significant impact on the implementation of regional financial management. Several methods that have been used in measuring the financial condition of the government still have limitations on the time period specified in the research and research outputs that are limited to quantitative data only. Therefore a government financial analysis model is needed that can cover the existing limitations with the implementation of the fiscal trend monitoring system (FTMS) model. This study aims to analyze and determine the financial condition of local governments by taking a locus in the Bandung Regency government. This research approach is qualitative, utilizing the FTMS model, which consists of five dimensions and twelve indicators of local government financial reports. The research results obtained are that the financial condition of Bandung Regency is still low. In terms of dimensions, only the revenue dimension has a positive trend while the rest, namely the expenditure dimension, the operating position of the local government, the debt structure, and the condition of fixed assets still have indicators with a negative trend. In detail, of the twelve indicators of the FTMS model of Bandung Regency government financial performance, seven indicators show a positive trend while the other five indicators still lead to a negative trend.

*Keywords: Financial Analysis, Fiscal Trend Monitoring System (FTMS), Trend*

### **ABSTRAK**

Setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki kemampuan dan kondisi keuangan yang berbeda-beda yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghadapi bencana seperti pandemi *corona virus disease-2019* (COVID-19) yang berdampak signifikan pada pengelolaan keuangan daerah. Beberapa metode yang sudah digunakan dalam mengukur kondisi keuangan pemerintah masih memiliki keterbatasan terutama pada kurun waktu yang ditentukan dalam penelitian dan *output* penelitian yang terbatas pada data kuantitatif saja. Oleh karena itu diperlukan model analisis keuangan pemerintah yang dapat menutupi keterbatasan yang ada dengan implementasi dari model *fiscal trend monitoring system* (FTMS). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah dengan mengambil lokus pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis berupa model FTMS yang terdiri dari 5 dimensi dan 12 indikator atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Bandung masih rendah. Secara dimensi, hanya dimensi pendapatan yang memiliki tren positif sedangkan sisanya, yaitu dimensi belanja, posisi operasi pemerintah daerah, struktur hutang, dan kondisi aktiva tetap masih memiliki indikator dengan tren yang masih negatif. Secara rinci bahwa dari 12 indikator model FTMS atas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, terdapat 7 indikator menunjukkan tren yang positif sedangkan 5 indikator lainnya masih mengarah pada tren yang negatif.

Kata Kunci: Analisis Keuangan, *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS), Tren

KLASIFIKASI JEL: H7, R5

### **CARA MENGUTIP**

Runjung, R. M. R. P. K. & Nalien, E. M. (2024). Analisis keuangan pemerintah dengan model *fiscal trend monitoring system*: Studi kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan*

## PENDAHULUAN

Perekonomian dan keuangan merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri atas beberapa aspek yang berkaitan dan saling memengaruhi yang berdasarkan pada ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta potensi sumber daya alam yang variatif. Sistem dimaksud secara eksplisit setidaknya terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Labetubun et al., 2021). Istilah lain dari sistem kompleks tersebut juga dapat diartikan sebagai makroekonomi yang membahas tentang perekonomian suatu negara, kebijakan, serta kondisi dari keuangan sektor publik (Hasyim, 2017).

Terhitung sejak Maret 2020 terjadi pandemi yang disebabkan oleh *corona virus disease-2019* (COVID-19) yang berdampak masif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sistem perekonomian serta pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan yang solutif pun ditetapkan pemerintah untuk menekan dampak negatif dari pandemi COVID-19 seperti penguatan sisi penerimaan serta relevansi dari sisi pengeluaran, pengalokasian anggaran penanganan akibat realokasi anggaran, serta penghematan belanja pemerintah. Kebijakan tersebut tetap diberlakukan meskipun defisit anggaran telah melebihi batas maksimal dalam peraturan perundangan tentang keuangan negara (Suparman, 2021). Temuan tersebut menandakan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada stabilitas keuangan dan tentunya makroekonomi dalam aspek dan skala yang lebih luas.

Selain dampak di atas, pandemi COVID-19 juga memengaruhi kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Adapun kondisi keuangan diartikan sebagai suatu situasi dimana pemerintah mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan (kewajiban jangka pendek, jangka panjang, operasional, dan layanan publik), mengantisipasi kejadian tak terduga serta mengeksekusi hak-hak keuangan secara efektif dan efisien (Ritonga, 2014a). Perlu diketahui bahwa kondisi dan kapasitas keuangan pemerintah daerah berbeda-beda tergantung pada bagaimana pengelolaan serta aspek lainnya dalam keuangan pemerintah. Kondisi keuangan dapat dilihat melalui rasio kemandirian keuangan. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung memiliki rasio kemandirian keuangan yang cenderung stabil sekalipun terdampak pandemi COVID-19 dengan rata-rata rasio kemandirian pada angka 74,16% dalam kurun waktu 2016-2021 (Runjung et al., 2022). Pada daerah lain, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berada pada angka rata-rata 5,55% dalam kurun

## PENERAPAN DALAM PRAKTIK

- Hasil analisis dan temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penentuan dan perumusan kebijakan di masa yang akan datang terkait pengelolaan keuangan dalam rangka memperbaiki tren menuju kondisi yang ideal.
- Perlu untuk menganalisis serta mengkaji bahwa rendah atau tingginya angka dalam keuangan pemerintah dapat memiliki banyak arti meskipun dari segi tren menunjukkan kondisi yang kurang optimal.

waktu 2016-2020 (Sanga & Jaeng, 2022). Kedua contoh daerah dengan rasio kemandirian keuangan yang berbeda tersebut menjadi bukti bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia itu variatif dan tidak merata. Selain melihat kondisi keuangan pemerintah dengan rasio kemandirian keuangan, terdapat pula rasio lain yang dapat digunakan seperti rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*debt service coverage ratio*) serta rasio utang terhadap pendapatan (Mahmudi, 2019).

Terdapat metode lain dalam menganalisis kondisi atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah seperti pada penelitian Susanto (2019) yang mengukur rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan, aktivitas, dan pertumbuhan dari pemerintah daerah sebagai indikator dalam menganalisis keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Zulkarnain (2020) menganalisis keuangan pemerintah daerah dengan berpatokan pada rasio ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, serta belanja modal dengan lingkup pembahasan yang lebih luas yaitu pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat.

Namun, beberapa metode yang digunakan dalam penelitian di atas memiliki keterbatasan pada kurun waktu yang ditentukan dalam penelitian dan *output* penelitian yang terbatas pada data kuantitatif saja. Seperti yang disebutkan di awal bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah di Indonesia sejak awal 2020 menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Oleh sebab itu diperlukan suatu metode pengukuran kondisi keuangan untuk mengakomodasi dan memberikan perbandingan yang jelas antara kondisi keuangan sebelum, saat, serta setelah terdampak oleh pandemi COVID-19. Guna memfasilitasi kebutuhan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan model pengukuran dan analisis keuangan berupa *fiscal trend monitoring system* (FTMS). Terdapat setidaknya dua penelitian

yang menggunakan pengembangan pada model FTMS. Penelitian pertama dari Kusnadi & Ritonga (2017) menggunakan dimensi struktur utang, basis pendapatan, dan fleksibilitas tingkat layanan dengan lima belas indikator di dalamnya. Sedangkan penelitian Priyono et al. (2020) mengukur kondisi keuangan pemerintah dengan memperhatikan faktor keuangan yang terdiri atas enam belas indikator yang terbagi dalam enam dimensi serta faktor lingkungan yang terdiri atas delapan indikator yang terbagi dalam dua dimensi. Merujuk kedua penelitian tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada faktor keuangan dengan indikator yang menggunakan data dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mengingat fokus pembahasan artikel ini adalah tentang bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dipilih menjadi lokus dalam penelitian ini dengan pertimbangan pada tiga aspek, yaitu jumlah populasi, angka pertumbuhan perekonomian, serta total pendapatan daerah. Pertama, Kabupaten Bandung konsisten menjadi kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan penduduk mencapai 3,66 juta jiwa pada tahun 2022 di bawah Kabupaten Bogor dengan populasi sebanyak 5,39 juta jiwa (BPS JABAR, 2022). Populasi menjadi pertimbangan dalam penentuan lokus karena dengan semakin banyaknya populasi maka dampak dari pandemi COVID-19 akan semakin dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk pada aspek keuangan dan perekonomian. Kedua, meskipun Kabupaten Bogor merupakan kabupaten/kota dengan penduduk paling banyak di Indonesia, namun angka pertumbuhan ekonominya tidak lebih baik dari Kabupaten Bandung sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2022 (%)

Daerah	2019	2020	2021	2022
Kab. Bogor	5,85	-1,77	3,55	5,20
Kab. Bandung	6,13	-1,87	3,56	5,35

Sumber: BPS (2023), diolah peneliti

Berdasarkan data pada Tabel 1, angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung lebih baik dibandingkan Kabupaten Bogor sehingga kinerja keuangan Kabupaten Bandung lebih baik. Hal tersebut didasarkan pada angka pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintahan daerah (Nurhayati & Hamzah, 2020). Ketiga, kendati Kabupaten Bandung memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi namun dari segi pendapatan daerah, Kabupaten Bogor lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Bandung sebagaimana data pada Tabel 2.

Tabel 2 Total Pendapatan Daerah Tahun 2019-2022 (dalam Triliun Rupiah)

Daerah	2019	2020	2021	2022
Kab. Bogor	6	6,7	6,7	7,7
Kab. Bandung	4,4	4,4	4,1	4,4

Sumber: LKPD (2023), diolah peneliti

Tabel 2 menunjukkan bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Bogor jauh berada di atas Kabupaten Bandung. Namun, meskipun Kabupaten Bandung kalah dari segi populasi dan pendapatan daerah, tetapi dari segi angka pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh pada kinerja keuangan daerah unggul dengan selalu berada di atas Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, Kabupaten Bandung ditetapkan menjadi lokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, peneliti tegaskan kembali bahwa tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung pada sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19 dengan rentang waktu 2015 hingga 2022 dengan menggunakan Model FTMS untuk kemudian mengetahui tren positif maupun negatif dari dimensi dan indikator yang difokuskan pada aspek keuangan. Hal tersebut juga sebagai *novelty* (kebaruan) dimana FTMS ini juga masih jarang digunakan, terbukti hingga saat ini baru dua penelitian yang menganalisis kondisi keuangan dengan menggunakan FTMS yaitu pertama dari Kusnadi & Ritonga (2017) dan Priyono et al. (2020). Melalui penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mempersiapkan kebijakan dan strategi keuangan yang optimal ke depannya melalui hasil penelitian dengan model FTMS. Selain itu, penelitian ini juga turut mengembangkan model FTMS dengan memfokuskan pembahasan pada aspek keuangan melalui dimensi dan indikator yang digunakan sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## STUDI LITERATUR

### Kondisi Keuangan Pemerintah

Kondisi keuangan pemerintah perlu untuk dianalisis dalam rangka memberikan gambaran yang baku dan komprehensif terkait sejauh mana kondisi dan kemampuan sebuah organisasi dalam menjalankan pelayanan, mengatasi kendala dalam perekonomian, serta pemenuhan atas kebutuhan yang senantiasa berkembang seiring dengan berjalannya waktu (Maher & Nollenberger, 2009). Kondisi atau keadaan keuangan juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi dalam aspek keuangan pemerintah yang timbul atas aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan nasional (Ritonga, 2014b).

Seiring perkembangan, pengukuran ataupun analisis atas kondisi keuangan pemerintah daerah banyak dikembangkan pada beberapa penelitian. Hasil penelitian dari Maizunati (2017) menyebutkan bahwa terdapat enam indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas anggaran, serta solvabilitas layanan. Penilaian dari hasil analisis atas keuangan pemerintah daerah tersebut dianggap akan mampu memberikan pengukuran dan penilaian atas pemenuhan kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya dengan asumsi bahwa pemerintah dengan pengelolaan keuangan yang optimal akan memiliki kondisi keuangan yang juga optimal (Indriani et al., 2020). Kemudian penelitian dari Putri (2022) mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan indikator solvabilitas jangka pendek, kemandirian keuangan, dan fleksibilitas keuangan yang merupakan pengembangan dari penelitian Ritonga (2014b). Penelitian dengan metode pengukuran kondisi keuangan serupa juga dikembangkan oleh Monica (2023), namun dengan lokus dan juga fokus pembahasan pada aspek kependudukan dan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator. Selain beberapa metode atau model pengukuran kondisi keuangan pemerintah di atas terdapat juga model *fiscal/financial trend monitoring system* (FTMS) yang akan diterapkan pada penelitian ini.

#### **Fiscal/Financial Trend Monitoring System (FTMS)**

Model pengukuran FTMS dikembangkan oleh *International City/County Management Association* (ICMA) dalam rangka memantau kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan fiskal dalam jangka panjang (ICMA, 2016). Terdapat beberapa model pengukuran untuk keuangan daerah dengan skala populasi dibawah 10.000 orang dengan istilah "10-point test" yang menitikberatkan pada sepuluh rasio keuangan yang terbagi dalam empat faktor yaitu a) pendapatan, b) belanja, c) posisi operasi, serta d) struktur utang (Brown, 1993). Model pengukuran keuangan daerah serupa juga dikembangkan oleh Chaney et al. (2002) yang mengukur kondisi keuangan dengan memperhatikan empat aspek yang terdiri atas posisi keuangan, kinerja keuangan, likuiditas, serta solvabilitas.

Pada perspektif fiskal, terdapat model pengukuran kondisi keuangan daerah yang berpatokan pada ketidakmampuan pemerintah daerah setempat dalam memenuhi standar operasional, utang, serta keperluan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam kurun beberapa tahun. Terdapat setidaknya sembilan indikator yang diteliti melalui model ini yang terdiri atas: 1)

pertumbuhan populasi, 2) pertumbuhan nilai pajak riil, 3) besaran penurunan nilai pajak riil, 4) pengeluaran dana umum sebagai persentase dari nilai pajak daerah, 5) defisit dari operasi dana umum, 6) defisit operasi dana umum pada tahun anggaran sebelumnya, 7) ukuran saldo dari dana umum, 8) defisit dari dana dalam tahun berjalan, serta 9) utang jangka panjang umum sebagai persentase dari nilai pajak daerah bersangkutan (Kloha et al., 2005). Sedangkan dari perspektif *financial health*, dimensi yang digunakan untuk mengembangkan sistem dalam pemantuan kondisi keuangan adalah melalui pembentukan evaluasi atas elemen pembentuk kondisi keuangan serta menciptakan suatu sistem yang turut memperhatikan aspek sosial-ekonomi sehingga kinerja keuangan dapat dioptimalkan (Zafra-Gomez et al., 2009).

Peneliti menganggap bahwa aspek yang diteliti dalam penelitian Brown (1993) dan Chaney et al. (2002) terlalu umum dalam mengukur aspek keuangan sehingga dalam prakteknya akan lebih sulit untuk mengukur indikator-indikator apa saja yang berpengaruh dalam menentukan kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Selain itu, faktor banyaknya populasi pada pemerintah daerah di Indonesia membuat pengembangan model tersebut kurang dapat berjalan secara optimal. Sedangkan dari pengembangan indikator dan dimensi pada penelitian dari Kloha et al. (2005) dan Zafra-Gomez et al. (2009) relatif memerlukan banyak data dan informasi kualitatif sehingga dalam prosesnya, hasil dari penelitian dinilai sulit untuk dipahami oleh orang awam.

Berpatokan pada hambatan dalam beberapa model pengukuran FTMS sebelumnya, terdapat pengembangan model FTMS yang dikembangkan Ritonga (2014a). Dalam penelitian tersebut dikembangkan beberapa model serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Terdapat beberapa model FTMS yang terdiri atas beberapa indikator yang sudah di implementasikan pada beberapa penelitian terdahulu yang juga menggunakan FTMS sebagai metode dalam pengukuran kondisi keuangan, seperti dalam penelitian Kusnadi & Ritonga (2017) dan Priyono et al. (2020). Mengingat bahwa dalam pengukuran kondisi keuangan pada pemerintah daerah di Indonesia relatif agak sulit dan tentunya berbeda dengan negara lain, maka penelitian ini akan mengimplementasikan serta mengembangkan model FTMS yang telah dikembangkan Ritonga, (2014a). Berikut adalah beberapa dimensi dan indikator yang digunakan pada pembahasan penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Beberapa indikator dalam penelitian ini difokuskan hanya pada aspek keuangan dari pemerintah daerah saja. Penelitian ini mengukur bagaimana dampak dari pandemi terhadap

Tabel 1 Indikator Pengukuran Kondisi Keuangan Menggunakan Model FTMS

Dimensi	Indikator	Rumus	Peringatan Tren
Pendapatan	Pendapatan per Kapita	Pendapatan Operasional Neto/ Populasi	Fluktuatif
	Pendapatan Pajak	Pendapatan Pajak	Menurun
	Surplus (Defisit) Pendapatan	Surplus(Defisit) Pendapatan / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
Belanja	Belanja per Kapita	Belanja Operasional Neto / Populasi	Meningkat
	Rasio Belanja Barang dan Jasa	Belanja Operasional untuk Fungsi (Barang & Jasa) / Total Belanja Operasional Neto	Meningkat
	Belanja Tetap	Belanja Tetap (Pegawai) / Total Belanja Operasional Neto	Meningkat
Posisi Operasi	Surplus (Defisit) Operasional	Surplus (Defisit) Operasional Dana Umum / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
	Posisi Operasional Pemda	Modal Kerja Pemda atau Pendapatan Operasional Pemda	Menurun
	Likuiditas	Kas dan Investasi Jangka Pendek / Kewajiban Jangka Pendek	Menurun
Struktur Hutang	Hutang Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Pendek / Pendapatan Operasional Neto	Meningkat
	Hutang Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Panjang / Populasi	Meningkat
Kondisi Aktiva Tetap	Belanja Modal	Belanja Modal / Belanja Operasional Neto	Menurun

Sumber: (Ritonga, 2014a), diolah peneliti

keuangan pemerintah daerah dan sudah sejauh mana kondisi keuangan dari pemerintah bersangkutan selama ini.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan yang disampaikan secara objektif. Pendekatan ini mulai dari pengumpulan data, penafsiran hingga penampilan hasil penelitiannya menggunakan angka untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.

Nilai tren diperoleh melalui analisis deskriptif terhadap data historis dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode 2015-2022. Analisis dilakukan dengan mengamati pola perubahan pada setiap indikator dalam model FTMS dari waktu ke waktu. Untuk memvisualisasikan tren, nilai aktual dipetakan dalam grafik bersama dengan garis tren yang menggambarkan arah perkembangan setiap indikator. Garis tren tersebut dihasilkan melalui pendekatan deskriptif yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum terkait kondisi keuangan daerah secara kronologis. Pada analisis deskriptif yang dimaksud, digunakan metode *Polynomial Trendline Order 2*. Metode ini digunakan untuk melihat tren keseluruhan data secara lebih akurat dibanding hanya menghitung naik-turun atau menggunakan rata-rata atau modus. Garis tren ini mengikuti persamaan kuadrat untuk menggambarkan pola perubahan data yaitu apakah meningkat, menurun, atau melengkung.

Adapun kerangka pikir penelitian ini bersifat induktif yaitu untuk meneliti suatu gejala yang sifatnya khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang umum berdasarkan dari hasil penelitian (Simangunsong, 2015). Penelitian ini menitikberatkan pembahasan kepada data sekunder yang berasal dari laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 hingga 2022 yang terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, serta laporan operasional (LO).

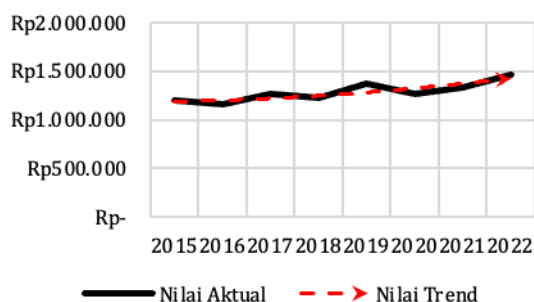
Data keuangan dimaksud selanjutnya dianalisis menggunakan model FTMS dengan indikator yang terbagi kedalam dimensi sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3 di atas. Langkah selanjutnya setelah data dan informasi diperoleh adalah dilanjutkan dengan proses analisis menggunakan teknik analisis yang terdiri dari lima tahapan, diawali dengan validasi data, pengorganisasian, penyusunan data dan informasi, penyajian temuan dalam penelitian, validasi hasil temuan penelitian, serta penafsiran dan teorisasi temuan dari pelaksanaan penelitian (Indrawan & Yaniawati, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur berupa diskusi, observasi partisipasi pasif, serta studi dokumen berupa data sekunder seperti LKPD dari Pemerintah Kabupaten Bandung (Creswell & Clark, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan model FTMS maka didapatkan hasil bahwa terdapat lima indikator yang menunjukkan tren negatif. Sedangkan sebanyak tujuh indikator sudah mengarah tren yang positif. Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Merujuk pada Tabel 4 maka dapat dilihat bahwa terdapat tujuh indikator yang sudah mengarah pada tren positif pada kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung yang terdiri dari indikator 1) pendapatan per kapita, 2) pendapatan pajak, 3) surplus/defisit pendapatan, 4) belanja tetap, 5) surplus/defisit operasional, 6) posisi operasional pemerintah daerah, serta 7) hutang jangka panjang. Sedangkan untuk lima indikator yang mengarah pada tren negatif adalah: 1) belanja per kapita, 2) rasio belanja barang dan jasa, 3)

Grafik 1 Hasil Perhitungan Indikator Belanja per Kapita di Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah peneliti

likuiditas, 4) hutang jangka pendek, dan 5) belanja modal. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan dan penjelasan secara deskriptif dari lima indikator dalam model FTMS di Kabupaten Bandung yang masih dalam tren negatif.

**Belanja per kapita.** Indikator belanja per kapita diharapkan dapat memberikan informasi tentang besaran pengeluaran/belanja tiap individu di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu satu bulan.

Pada model FTMS, indikator belanja per kapita dikatakan sudah dalam tren yang baik apabila mengarah pada tren yang menurun. Indikator belanja per kapita yang baik dalam metode FTMS seharusnya menunjukkan tren yang menurun dari waktu ke waktu. Sedangkan sesuai dengan data yang tersaji pada Grafik 1, menunjukkan bahwa tren

indikator belanja per kapita di Kabupaten Bandung cenderung mengarah pada peningkatan pada kurun waktu 2015 hingga 2022. Berdasarkan keterangan dari wawancara dengan Kepala Subbidang (Kasubbid) Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, Niken Binarti Indahyani, tren negatif tersebut disebabkan oleh peningkatan belanja operasional daerah setiap tahunnya yang juga diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2% per tahun.

Kendati pada 2020 angka belanja per kapita di Kabupaten Bandung mengalami penurunan yang disebabkan pandemi COVID-19 pada perekonomian pemerintah daerah, namun angka penurunan yang terjadi tidak lebih rendah dibanding angka belanja per kapita Kabupaten Bandung pada kurun 2015-2018. Pasca pandemi COVID-19, angka belanja operasional Pemerintah Kabupaten Bandung cenderung berangsur kembali normal seiring dengan membaik serta pulihnya perekonomian, sehingga angka belanja per kapita di Kabupaten Bandung pada 2021 dan 2022 menunjukkan tren peningkatan.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui BKAD harus dapat mengeluarkan serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan total belanja daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada belanja per kapita. Serangkaian upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten

Tabel 2 Hasil Perhitungan Menggunakan Model *Fiscal Trend* Monitoring System (FTMS)

Dimensi	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tren
Pendapatan	Pendapatan Per Kapita*	1.441.475	1.444.610	1.426.287	1.450.371	1.679.620	1.531.483	1.716.604	1.764.686	Positif
	Pendapatan Pajak**	340,0072	380,7101	464,5928	468,4785	525,0690	491,7635	562,6608	680,5490	Positif
	Surplus (Defisit) Pendapatan	0,0484	0,0988	0,0903	0,1298	0,0910	0,0879	0,1477	0,0838	Positif
Belanja	Belanja Per Kapita*	1.196.855	1.155.790	1.260.272	1.226.726	1.364.938	1.260.642	1.333.827	1.464.076	Negatif
	Rasio Belanja Barang dan Jasa	0,3141	0,3249	0,3579	0,3402	0,2922	0,2689	0,3097	0,3498	Negatif
	Belanja Tetap	0,4742	0,5161	0,4365	0,4453	0,4687	0,4774	0,4574	0,4145	Positif
Posisi Operasi	Surplus (Defisit) Operasional	0,0164	0,0773	0,1254	0,1396	0,1309	0,1181	0,1022	0,04039	Positif
	Posisi Operasional Pemda**	4.476,8176	4.670,66943	5.081,2603	5.259,9748	5.730,1851	5.345,9928	5.752,8690	5.910,2281	Positif
Struktur Hutang	Likuiditas	191%	964%	1186%	852%	634%	452%	678%	357%	Negatif
	Hutang Jangka Pendek	0,0054	0,0047	0,0090	0,0136	0,0138	0,0158	0,0154	0,0168	Negatif
	Hutang Jangka Panjang	0,0003	0,0002	0,0001	0	0	0	0	0	Positif
Kondisi Aktiva Tetap	Belanja Modal	0,1674	0,1434	0,1363	0,1563	0,2111	0,1519	0,1462	0,1577	Negatif

Ket: \*) dalam Rupiah (Rp)

Sumber: LKPD Kabupaten Bandung (2023), diolah peneliti

Bandung selaku *stakeholder* dapat berupa evaluasi dan peningkatan efektifitas belanja daerah, menjaga stabilitas anggaran belanja yang sudah ada, ataupun serangkaian kegiatan atau langkah lainnya.

**Rasio Belanja Barang dan Jasa.** Indikator rasio belanja barang dan jasa dalam model FTMS bertujuan untuk mengetahui besaran belanja yang dianggarkan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Indikator rasio belanja barang dan jasa didapatkan dari perhitungan total belanja barang dan jasa dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dibagi total belanja operasional neto. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh indikator rasio belanja barang dan jasa sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 2.

Tren positif dari indikator rasio belanja barang dan jasa dalam model FTMS berlaku apabila menunjukkan penurunan. Sebagaimana yang terdapat pada Grafik 2, tren yang ditunjukkan oleh garis merah mengarah pada peningkatan meskipun relatif tidak terlalu signifikan. Dalam kurun 2015 hingga 2017 indikator rasio belanja barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan peningkatan, sedangkan terhitung sejak 2017 hingga 2020 menunjukkan penurunan yang cukup terlihat. Titik terendah dari indikator rasio belanja barang dan jasa terjadi pada 2020 yang disebabkan oleh dampak negatif dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan total rasio belanja barang dan jasa (belanja barang dan jasa) di Kabupaten Bandung hanya 0,268992763 atau 26,8% dari total belanja operasional di Kabupaten Bandung. Kendati secara bobot, rasio belanja barang dan jasa mengalami penurunan pada 2017 hingga 2020, namun hal tersebut sejatinya menunjukkan tren yang positif dalam model FTMS. Semakin mengecilnya bobot dari rasio belanja barang dan jasa tentunya membuat bobot dari total belanja dapat dialokasikan kepada belanja yang lebih penting dan bermanfaat seperti belanja modal.

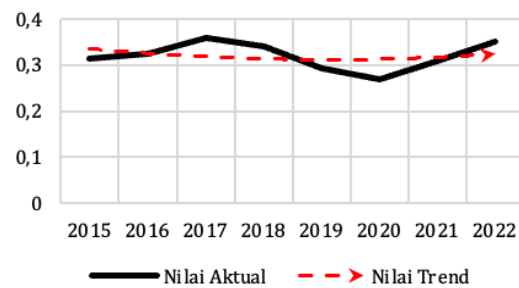
Indikator rasio belanja barang dan jasa pada 2021 dan 2020 mengalami peningkatan seiring dengan pulihnya perekonomian di daerah pasca pandemi COVID-19. Sesuai dengan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa pada 2021 angka rasio belanja barang dan jasa Kabupaten Bandung adalah 0,30977401 atau 30,9% sedangkan pada 2022 bobot rasio belanja barang dan jasa di Kabupaten Bandung adalah 0,349893925 atau 34,9% dari total belanja operasional daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Pendapatan dan Belanja Daerah, kendati secara bobot belanja barang dan jasa di Kabupaten Bandung mencapai 35% dari total belanja operasional dan masih dapat dikatakan wajar dan proporsional, namun perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah selaku *stakeholder* karena terjadi tren peningkatan sehingga akan berpengaruh pada bobot rasio belanja barang dan

jasa yang apabila semakin tinggi tentunya berpengaruh pada proporsionalitas belanja daerah di Kabupaten Bandung.

**Likuiditas.** Indikator likuiditas dalam model FTMS digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kewajiban atau hutang yang dimiliki dengan secepat mungkin menggunakan kas/investasi yang dimiliki oleh daerah. Indikator ini didapatkan dari perhitungan antara total kewajiban yang dimiliki daerah dibagi dengan total kas di daerah dan investasi jangka pendek yang dimiliki daerah yang bersifat likuid atau mudah untuk ditarik. Berikut adalah Grafik 3 hasil perhitungan indikator likuiditas di Kabupaten Bandung.

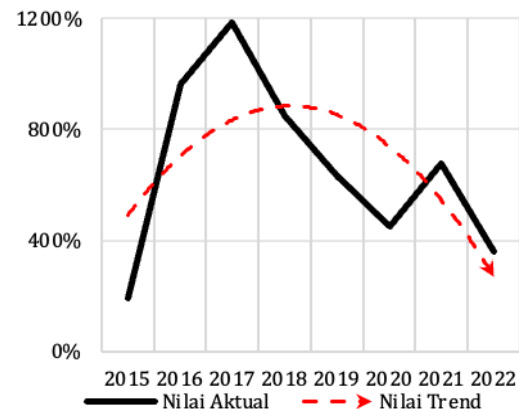
Berpatokan pada data yang digambarkan pada Grafik 3, dapat disimpulkan bahwa terjadi tren penurunan pada indikator likuiditas dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam periode tahun 2015-2022. Tren menurun tersebut berarti negatif dalam model FTMS karena digambarkan bahwa kemampuan daerah dalam membayar seluruh kewajiban/hutang yang dimiliki cenderung menurun seiring waktu. Kendati tren menunjukkan penurunan namun pada titik tertinggi, tingkat likuiditas dari Pemerintah Kabupaten Bandung berada pada angka 1186% atau Pemerintah

Grafik 2 Hasil Perhitungan Indikator Rasio Belanja Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung



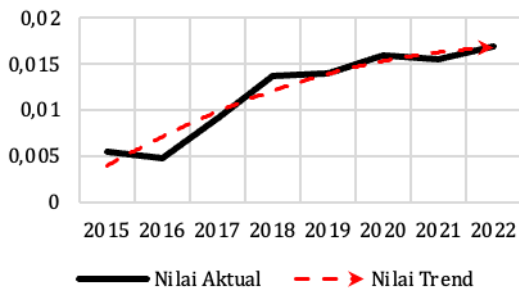
Sumber: Diolah peneliti

Grafik 3 Hasil Perhitungan Indikator Likuiditas di Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah peneliti

Grafik 4 Hasil Perhitungan Indikator Hutang Jangka Pendek di Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah peneliti

Kabupaten Bandung memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban/hutang yang dimiliki dengan aset yang ada sebanyak 11,8 kali lebih banyak dari total kewajiban/hutang yang ada pada tahun anggaran 2017.

Tingkat likuiditas di suatu daerah bergantung pada seberapa banyak jumlah kas dan investasi jangka pendek di daerah yang bersifat likuid serta seberapa banyak kewajiban/hutang yang dimiliki daerah bersangkutan. Semakin banyak kas di daerah tidak selalu menandakan bahwa keuangan daerah sehat. Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung, Tedy Anwar, melalui wawancara menyatakan bahwa dengan banyaknya uang pada kas daerah dapat berarti terdapat sejumlah uang yang tidak digunakan/diserap atau *idle-money* sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebenarnya harus waspada akan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain, banyak atau sedikitnya kewajiban/hutang yang dimiliki daerah tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan daerah.

Selanjutnya, perlu untuk dipahami bahwa kendati tren indikator likuiditas menunjukkan penurunan, namun pada titik terendah sekalipun yang terjadi pada tahun anggaran 2022, angka likuiditas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebesar 357% atau jumlah aset yang dimiliki sebesar 3,5 lebih banyak dibanding total kewajiban/hutang yang dimiliki Kabupaten Bandung. Angka 357% bukan merupakan angka yang kecil, namun karena model FTMS berbicara tentang tren, maka indikator likuiditas ini perlu diperhatikan karena masih menunjukkan tren yang negatif dalam kurun waktu 2015 hingga 2022. Indikator likuiditas tidak terlalu terdampak dengan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 karena terhitung sejak 2017 hingga 2019 memang sudah menunjukkan tren yang menurun.

**Hutang jangka pendek.** Indikator hutang jangka pendek diperoleh dengan menggunakan perhitungan antara total kewajiban/hutang jangka pendek dari pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang dibagi dengan total pendapatan operasional pada tahun anggaran yang sama. Dari indikator ini maka akan diperoleh gambaran

seberapa besar kewajiban/hutang jangka pendek yang dimiliki suatu pemerintah daerah yang selanjutnya berbanding dengan total penerimaan daerah bersangkutan. Hasil dari perhitungan tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar total kewajiban jangka pendek suatu pemerintah daerah dibandingkan dengan total penerimaan yang ada. Indikator hutang jangka pendek dalam model FTMS diklasifikasikan dalam tren yang kurang baik apabila menunjukkan tren yang mengarah pada peningkatan. Berikut adalah Grafik 4 dari hasil perhitungan indikator hutang jangka pendek pada Pemerintah Kabupaten Bandung.

Grafik 4 menunjukkan bahwa tren indikator hutang jangka pendek hasil perhitungan menggunakan model FTMS di Kabupaten Bandung meningkat dalam periode tahun 2015-2022. Angka indikator hutang jangka pendek terendah di Kabupaten Bandung terdapat pada tahun anggaran 2016 pada angka 0,004757482 atau 0,47% dari total pendapatan operasional neto di Kabupaten Bandung. Sedangkan untuk angka tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan indikator hutang jangka pendek sebesar 0,016810685 atau 1,68% dari total pendapatan operasional neto di Kabupaten Bandung.

Indikator hutang jangka pendek di Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan dalam model FTMS diklasifikasikan sebagai tren yang negatif dan perlu untuk menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Peningkatan pada tren indikator hutang jangka pendek tersebut disebabkan adanya peningkatan total kewajiban jangka pendek di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2015 hingga 2022.

Berdasarkan keterangan Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung, penyebab dari peningkatan angka kewajiban jangka pendek tersebut adalah adanya pencatatan/penatausahaan atas jasa yang telah digunakan tetapi pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya sehingga dicatat sebagai kewajiban. Selain itu, faktor keterampilan dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Bandung juga menjadi faktor yang menentukan mengapa terdapat beberapa akun yang masih tercatat sebagai kewajiban jangka pendek padahal di sisi lain kas daerah Kabupaten Bandung masih tersedia untuk melunasinya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kasubbid Pendapatan dan Belanja Daerah juga menambahkan melalui keterangan wawancara bahwa meskipun indikator hutang jangka pendek angkanya relatif kecil apabila dibandingkan total pendapatan operasional neto di Kabupaten Bandung, namun dengan angka yang memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun, kendala kurangnya kompetensi dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya diatasi sehingga suatu transaksi harus dicatat sebagai kewajiban jangka pendek



padahal masih terdapat kas di daerah atau *idle-money* yang tersedia.

Isu terkait kurangnya kompetensi dalam penatausahaan keuangan di Kabupaten Bandung merupakan kendala yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Bandung selaku *stakeholder*. Sama seperti indikator likuiditas pada pembahasan sebelumnya, pada indikator hutang jangka pendek tidak terlalu terdampak oleh adanya situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan dari total kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa walaupun terdampak COVID-19 namun angka total dari kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Belanja modal.** Belanja modal merupakan total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap ataupun aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Indikator belanja modal dalam model FTMS digunakan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi dari belanja modal pada suatu pemerintah daerah dalam waktu satu tahun anggaran. Indikator belanja modal didapatkan dari perhitungan antara total belanja modal yang dibagi dengan total belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang sama. Berdasarkan model FTMS atas indikator belanja modal tersebut, berikut adalah Grafik 5 hasil perhitungannya di Kabupaten Bandung.

Grafik 5 menunjukkan tren indikator belanja modal di Kabupaten Bandung yang ditunjukkan oleh garis merah mengarah pada penurunan dalam kurun waktu 2015 hingga 2022. Terhitung sejak 2015 hingga 2017, belanja modal di Kabupaten Bandung memiliki tren menurun. Namun sejak 2017 ke 2019 angka belanja modal di Kabupaten Bandung meningkat cukup drastis hingga mencapai angka 0,211186697 atau 21,1% belanja daerah Kabupaten Bandung pada 2019 ditujukan untuk belanja modal. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung, peningkatan

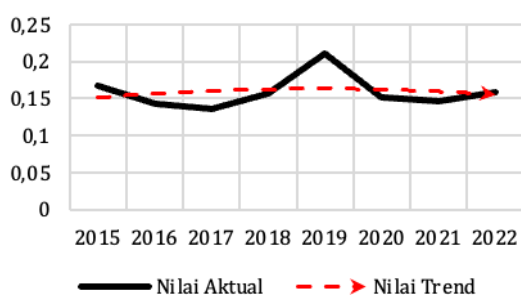
angka belanja modal tersebut digunakan untuk pembangunan mall pelayanan publik yang megah sehingga juga dijadikan sebagai *landmark* dari Kabupaten Bandung.

Setelah 2019, bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2020 membuat bobot belanja modal di Kabupaten Bandung menurun drastis ke angka 0,151945177 atau 15,1% saja pada 2020. Angka belanja modal tersebut kembali mengalami penurunan pada 2021 ke angka 0,146225441 atau 14,6% sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada 2022 dengan bobot sebesar 0,15778584 atau 15,7%. Meskipun terdapat beberapa kali peningkatan pada indikator belanja modal, namun secara tren maka indikator belanja modal mengalami penurunan. Hal ini berarti indikator tersebut memiliki tren negatif dalam model FTMS sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bandung selaku *stakeholder* agar dapat diperbaiki melalui peningkatan bobot belanja modal pada tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan keterangan dari Kasubbid Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKAD Kabupaten Bandung, angka belanja modal yang dilaksanakan Kabupaten Bandung yang hanya berada pada rata-rata 15,41% dalam periode tahun 2015-2022 masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 147 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, belanja infrastruktur pelayanan publik (belanja modal) paling rendah harus dialokasikan sebesar 40% di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (Pemerintah Indonesia, 2022). Pada ayat (3) Pasal 147 disebutkan bahwa daerah yang belum mengalokasikan minimal 40% APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik maka harus menyesuaikan porsi belanja daerah paling lama lima tahun terhitung sejak UU No.1 Tahun 2022 ditetapkan (Pemerintah Indonesia, 2022). Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat meningkatkan besaran belanja modal yang pada tahun anggaran 2022 sebesar 15,77% menjadi paling sedikit 40% pada 2027 nantinya.

Sesuai dengan hasil perhitungan 12 indikator yang terbagi ke dalam lima dimensi dalam model FTMS pada Tabel 3 di atas, maka didapatkan data bahwa tujuh indikator sudah menunjukkan tren yang positif sedangkan lima indikator mengarah ke tren negatif. Adapun indikator yang sudah menunjukkan tren yang positif di Kabupaten Bandung adalah: 1) pendapatan per kapita, 2) pendapatan pajak, 3) surplus/defisit pendapatan, 4) belanja tetap, 5) surplus/defisit operasional, 6) posisi operasional pemerintah daerah, dan 7) hutang jangka panjang. Sedangkan untuk lima indikator yang mengarah pada tren negatif adalah:

Grafik 5 Hasil Perhitungan Indikator Belanja Modal di Kabupaten Bandung



Sumber: Diolah peneliti

1) belanja per kapita, 2) rasio belanja barang dan jasa, 3) likuiditas, 4) hutang jangka pendek, dan 5) belanja modal.

Secara dimensi, dimensi pendapatan yang terdiri atas pendapatan per kapita, pendapatan pajak, dan surplus/defisit pendapatan, ketiganya sudah menunjukkan tren positif sehingga dimensi pendapatan sudah dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk dimensi belanja yang terdiri atas belanja per kapita, rasio belanja barang dan jasa, dan belanja tetap, menunjukkan bahwa hanya belanja tetap saja yang sudah menunjukkan tren yang positif, sedangkan untuk belanja per kapita dan rasio belanja barang dan jasa masih dalam tren negatif. Hal tersebut menyebabkan dimensi belanja dari Kabupaten Bandung masih perlu untuk menjadi perhatian dan diperbaiki ke depannya. Pada dimensi posisi operasi yang terdiri atas surplus/defisit operasional, posisi operasional pemerintah daerah, dan likuiditas, menunjukkan bahwa hanya indikator likuiditas saja yang masih dalam tren yang negatif sehingga masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, dimensi struktur hutang yang terdiri atas indikator hutang jangka pendek dan indikator hutang jangka panjang hanya menunjukkan bahwa indikator hutang jangka pendek saja yang masih dalam tren kurang baik karena masih meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu untuk di evaluasi untuk perbaikan tren agar mengarah positif. Pada dimensi kondisi aktiva tetap, yang terdiri atas indikator belanja modal masih belum menunjukkan tren yang positif karena proporsi dari belanja modal di Kabupaten Bandung masih menunjukkan arah penurunan yang berarti tren yang negatif dan perlu untuk menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke depannya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengolah data menggunakan model FTMS yang dilanjutkan dengan proses wawancara tidak terstruktur (diskusi) dengan Bapak Tedy Anwar selaku Sekretaris BKAD Kabupaten Bandung dan Ibu Niken Binarti Indahyani selaku Kepala Sub bidang Pendapatan dan Belanja Daerah pada BKAD Kabupaten Bandung dalam kurun waktu Agustus 2021 hingga Juli 2022. Penentuan kedua informan tersebut didasarkan pada pengalaman mengabdikan di bidang keuangan Kabupaten Bandung selama puluhan tahun serta kesesuaian bidang yang menjadi diskusi yaitu pada keuangan daerah secara umum, dan belanja daerah secara khusus. Diskusi tersebut ditujukan untuk membicarakan hasil perhitungan dari model FTMS atas LKPD Kabupaten Bandung dan membahas sebab dari setiap kenaikan dan penurunan pada tren dari dua belas indikator yang diteliti. Dari hasil diskusi dengan kedua informan pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa apabila berbicara terkait keuangan daerah,

suatu angka yang turun belum tentu buruk dan suatu angka yang naik belum tentu baik. *Statement* tersebut menekankan bahwa naik-turunnya suatu angka dalam keuangan perlu dicari sebab-akibatnya sebelum bisa disimpulkan secara utuh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini maka didapatkan kesimpulan bahwa dari 12 indikator yang terbagi ke dalam lima dimensi yang diteliti menggunakan model FTMS atas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung, didapatkan bahwa terdapat tujuh indikator sudah berada pada tren yang positif dan terdapat lima indikator yang masih mengarah pada tren yang negatif. Secara dimensi, hanya dari dimensi pendapatan saja di Kabupaten Bandung yang sudah menunjukkan tren yang positif. Sedangkan pada dimensi lainnya, yaitu dimensi belanja, posisi operasi pemerintah daerah, struktur hutang, dan kondisi aktiva tetap masih memiliki indikator dengan tren yang masih negatif sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung ke depannya.

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan juga dapat memberikan gambaran atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2015-2022. Perlu ditekankan bahwa hasil maupun angka yang terdapat dalam penelitian ini masih perlu untuk dikaji dan dipelajari secara lebih seksama karena dalam penelitian ini sebatas berbicara soal tren keuangan di Kabupaten Bandung.

## PENGHARGAAN

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada proses penyusunan hingga penelitian ini dapat selesai dibuat. Terima kasih terutama peneliti ucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung atas kerjasama dan ketersediannya dalam memberikan keterangan yang berguna bagi penelitian ini. Selanjutnya kepada pembimbing akademik peneliti yang sudah memberikan arahan dan petunjuk selama penulisan penelitian ini sejak awal.

## REFERENSI

- BPS JABAR. (2022). *Jumlah penduduk hasil proyeksi interim di Provinsi Jawa Barat menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin (orang), 2021-2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.  
<https://jabar.bps.go.id/indicator/12/731/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-interim-di-provinsi-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Brown, K. W. (1993). The 10-point test of financial condition: Toward an easy-to-use assessment tool for smaller cities. *Government Finance*

- Review*, 9(6), 21–26.
- Chaney, B. A., Mead, D. M., & Schermann, K. R. (2002). The new governmental financial reporting model: What it means for analyzing governmental financial condition. *Journal of Governmental Financial Management*, 51(1), 26–31.
- Creswell, J. W. & Clark, V. L. P. (2007). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage Publications. <https://doi.org/10.1111/j.1753-6405.2007.00096.x>
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro* (2nd ed.). Kencana Prenada Media.
- ICMA. (2016). *The international city/county management association*. <http://icma.org/>
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. (2016). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. PT. Refika Aditama.
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis kondisi keuangan pemerintah kabupaten di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 175–182.
- Kloha, P., Weissert, C. S., & Kleine, R. (2005). Developing and testing a composite model to predict local fiscal distress. *Public Administration Review*, 65(3), 313–323.
- Kusnadi, F. H., & Ritonga, I. T. (2017). Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1).
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., Tanjung, R., Nopralia, S., Hasanuddin, H., Mustamin, S. W., Rachmarwi, W., Hartoto, H., Azizi, M., Siregar, R. T., Solikin, A., & Nugroho, L. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. CV Widina Media Utama.
- Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown's "10-point test." *Government Finance Review*, 25(5), 61–66.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UUP STIM YKPN.
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Magelang dalam klaster kota di Jawa-Bali. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 139–162.
- Monica, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1654–1668.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 1(2), 22–34. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah*. Kementerian Sekretariat Negara.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., Bharata, R. W., & Arifah, S. (2020). Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah dengan model fiscal trend monitoring system (FTMS) di Kota Magelang. *Journal of Public and Business Accounting*, 2, 1(2), 1–11.
- Putri, F. C. (2022). Kondisi keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 410–415.
- Ritonga, I. T. (2014a). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Ritonga, I. T. (2014b). Developing a measure of local government's financial conditions. *Journal of Indonesia Economy and Business*, 29(2), 142–164.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik (JEKP)*, 9(2), 96–111.
- Sanga, K. P., & Jaeng, W. M. Y. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal on Education*, 5(2), 2721–2728.
- Simangunsong, F. (2015). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Literatur IPDN.
- Suparman, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Zafra-Gomez, J. L., Hernandez, A. M. L., & Batisda, A. H. (2009). Developing a model to measure financial condition in local government. *The American Review of Public Administration*, 39(4), 425–449.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. *CAKRAWALA - Repositori IMWI*, 3(1), 63–74.